## ABSTRAK

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SENJATA API ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UU DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951

Oleh: **Jendraly Dicko Isdiansah (NIM. 22 241 0026)**

Penegakan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal di Indonesia merupakan isu penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi dasar hukum utama yang mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan senjata api ilegal dari perspektif undang-undang tersebut dan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh petugas penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menganalisis undang-undang dan putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dianggap berat, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti pengawasan yang terbatas, peredaran senjata ilegal lintas wilayah, dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Oleh karena itu, perlu memperkuat sinergi antar petugas penegak hukum, meningkatkan sistem pengawasan, dan memperbarui kebijakan yang beradaptasi dengan perkembangan kejahatan. Hal ini akan memastikan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap senjata api ilegal dan memberikan efek jera kepada para pelaku.



Kata Kunci: **Penegakan Hukum, Senjata Api ilegal, UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Tindak Pidana, Keamanan**